

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tanggal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Bulan | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | 2023 |
| | | | | | | | | | ✓ | | | | |

BPK Beri

Empat Catatan

Soroti Dana Hibah hingga Anggaran Reses

BANDARLAMPUNG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung menemukan sejumlah kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun 2022. Pada resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terkait peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh penanggung jawab pemeriksa, Yusnadewi, pada 6 Mei 2023, ada beberapa pokok temuan.

Pertama, pengelolaan hibah yang tidak sesuai ketentuan dan dianggarkan tanpa memperhatikan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sehingga membebani keuangan daerah. Kedua, belanja kegiatan reses pada sekretariat DPRD tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp1.473.130.000

dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp921.618.980 sehingga mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah minimal sebesar Rp921.618.980. Ketiga, Pemprov Lampung kurang mengalokasikan dana bagi hasil (DBH) pajak daerah dan menganggarkan bagi hasil pajak daerah tidak sebesar kewajibannya sehingga mengakibatkan belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota kurang dialokasikan sebesar Rp31.681.655.489,53.

Baca | BPK | Hal. 4

BPK..

Sambungan dari Hal. 1

Kemudian belanja bagi hasil pajak daerah yang terutang kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp606.696.573.903 tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan. Keempat, pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan sehingga antara lain mengakibatkan tujuan pembangunan atas kawasan Kota Baru sebagai ibu kota provinsi yang baru tidak tercapai, gedung bangunan dan KDP yang telah dibangun menjadi terbengkalai dan rusak sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar berkoordinasi dengan DPRD untuk menyalurkan perda tentang pajak daerah dengan ketentuan terkait. Juga mengevaluasi perencanaan atas kelanjutan pembangunan dan

menganggarkan belanja pemeliharaan untuk aset-aset yang telah dibangun di kawasan Kota Baru sesuai dengan RPJMD dan RKPD. BPK juga memerintahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan memverifikasi anggaran belanja hibah. Dalam melakukan verifikasi anggaran mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya Kepala BKAD, Kepala Biro Kesra, Kepala Dispora, dan Kepala Kesbangpol diperintahkan untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja hibah dan bersama. Kepala bagian terkait pada masing-masing OPD dapat mengusulkan belanja hibah memedomani ketentuan yang berlaku dan menghentikan

pemberian hibah yang tidak sesuai ketentuan. Lalu Sekretaris DPRD diperintahkan untuk memproses indikasi kerugian daerah minimal sebesar Rp921.618.980 dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah. Kemudian memerintahkan kepada inspektur untuk melakukan penelusuran atas bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.473.130.000 yang tidak dapat diyakini kewajarannya dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses pengembalian ke kas daerah sesuai ketentuan apabila terdapat realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto belum berhasil dikonfirmasi. Pesan *WhatsApp* yang dikirim *Radar Lampung* tadi malam hingga berita ini diturunkan belum kunjung direspons. (pip/c1/fik)